

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer* telah mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Melalui ratifikasi konvensi-konvensi internasional seperti *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006, *International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS), dan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* (STCW), Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan standar kesejahteraan, keselamatan, dan pelatihan bagi pelautnya. Kepatuhan Indonesia dapat dikategorikan sebagai “*treaty induced compliance*,” di mana ratifikasi dan implementasi konvensi-konvensi ini telah mendorong perubahan positif dalam regulasi dan praktik di sektor maritim.

Namun, efektivitas rezim internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah yang sering muncul termasuk penipuan pekerjaan, upah yang tidak dibayar, dan kondisi kerja yang tidak aman. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam regulasi, implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan pelayaran, dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam memastikan implementasi yang efektif dari konvensi-konvensi ini. Selain itu, kerjasama dengan organisasi internasional seperti *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Labour*

Organization (ILO) juga memainkan peran kunci dalam mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan standar perlindungan bagi pelaut.

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan hak pelaut melalui ratifikasi dan implementasi berbagai konvensi internasional, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan kepatuhan penuh terhadap standar internasional. Hal ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi semua pelaut Indonesia.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*, beberapa saran strategis dapat diusulkan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait implementasi konvensi internasional seperti MLC, SOLAS, dan STCW. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas lembaga pengawas dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk inspeksi dan audit kapal. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa standar internasional diterapkan secara konsisten di seluruh sektor maritim.

Kedua, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan bagi pelaut serta perusahaan pelayaran mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah konvensi internasional. Program pelatihan dan sosialisasi yang komprehensif dapat membantu mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan. Pelaut harus

diberikan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka, termasuk upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan kondisi kerja yang aman.

Ketiga, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi pelaut. Ini termasuk membentuk forum atau platform dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu terkait dan mencari solusi bersama. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya kepatuhan terhadap standar internasional.

Keempat, Indonesia perlu terus berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Labour Organization* (ILO) untuk mendapatkan dukungan teknis dan berbagi praktik terbaik dalam implementasi konvensi. Dukungan dari organisasi internasional dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi konvensi dan memastikan bahwa standar internasional diterapkan secara efektif.

Terakhir, penting untuk mengatasi tantangan struktural seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya sumber daya dengan reformasi kebijakan yang lebih efisien dan alokasi anggaran yang tepat. Pemerintah harus memastikan bahwa ada dukungan yang memadai untuk implementasi konvensi internasional, termasuk penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelautnya, sehingga menciptakan industri maritim yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Kepatuhan yang masuk ke dalam kategori “*treaty induced compliance*” menunjukkan bahwa ratifikasi dan implementasi konvensi internasional dapat mendorong perubahan positif dalam regulasi dan praktik di sektor maritim.